

STRATEGI MEMPERBAIKI KESEJAHTERAAN PETANI SAWIT MELALUI TATA KELOLA HARGA TBS DAN DANA PERKEBUNAN SAWIT



TEMUAN UTAMA

- 1 Penetapan Harga TBS di Tingkat Petani belum Berpihak kepada Petani Sawit;
- 2 Penggunaan Dana Perkebunan Sawit belum Memberikan Dampak terhadap Kesejahteraan Petani Sawit;
- 3 Belum Ada Mekanisme Kebijakan dan Program yang Komprehensif dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat.



1. PENDAHULUAN

Petani sawit sejahtera, masih jauh dari harapan. Begitulah faktanya, kemiskinan masih membelenggu kehidupan para petani sawit, terutama petani gurem, yang kepemilikan lahannya kurang dari 2 hektare dan bertani secara subsistensi¹. Geliat ekonomi sawit, hanya dinikmati oleh korporasi dan pemilik modal besar yang mampu menguasai lahan skala luas².

Upaya memperbaiki kesejahteraan petani sawit belum menjadi agenda utama pembangunan sektor strategis nasional ini. Faktanya, dana perkebunan sawit (CPO Fund) yang seharusnya diperuntukan bagi kesejahteraan petani, malah dikooptasi oleh kepentingan perusahaan biodiesel³. Begitu juga dalam pasar, mereka terdiskriminasi oleh kepentingan korporasi dalam penetapan harga tandan buah segar (TBS)⁴. Padahal, harga tersebut merupakan faktor utama bagi kesejahteraan petani sawit. Karena, itu sumber utama bagi pendapatan rumah tangga petani.

Ke depan, sudah selayaknyalah agenda peningkatan kesejahteraan petani sawit menjadi perhatian pemerintah. Ada dua agenda yang perlu dilakukan, yaitu mendorong perbaikan mekanisme penetapan harga TBS yang tidak mendiskriminasi petani dan mendorong dana perkebunan sawit untuk peningkatan kesejahteraan petani sawit, terutama petani swadaya dengan kepemilikan lahan yang kecil.

2. PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kedua metode ini digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan data yang komprehensif, valid, reliabel dan objektif⁵.

2.2 Sumber Data

Data dari kajian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dan berbagai sumber data resmi lainnya.

2.3 Analisis Input-Output

Analisis input-output (I-O) digunakan untuk menganalisis dampak dari penggunaan dana perkebunan sawit terhadap peningkatan faktor produksi antar sektor. Analisis ini merupakan alat untuk melihat keseimbangan umum dalam suatu kegiatan perekonomian⁶. Keseimbangan umum dalam analisis input-output didasarkan arus transaksi antar pelaku perekonomian. Dalam hal ini kita menggunakan basis data dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM).

¹Santika T, Wilson KA, Budiharta S et al. 2019. Does oil palm agri culture help alleviate poverty? A multidimensional coun terfactual assessment of oil palm development in Indone sia. *World Development* 120. doi: 10.1016/j.world dev.2019.04.012.

²Saputra W. 2018. Fakta semu ekonomi sawit. Dapat didownload pada: <https://kolom.tempo.co/read/1095165/fakta-semu-ekonomi-sawit>

³Nurfatriani F, Ramawati, Sari GK dan Komarudin H. 2018. Optimal isasi dana sawit dan pengaturan instrumen fiskal penggu naan lahan hutan untuk perkebunan dalam upaya mengu rangi deforestasi. Working Paper 238. Bogor, Indonesia: CIFOR.

⁴Daemeter Consulting (2015): Indonesian oil palm smallholder farmers: A typology of organizational models, needs, and investment opportunities. Daemeter Consulting, Bogor, Indonesia.

⁵Sudaryono. 2019. Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan mix method: Edisi kedua. Jakarta. Penerbit RajaGrafindo.

⁶Nazarra S. 2005. Analisis input output: Edisi Kedua. Jakarta. Lem baga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ada lima skenario yang menjadi basis analisis. Skenario pertama, dana perkebunan sawit sebesar Rp 11,7 triliun digunakan untuk membiayai program yang terkait langsung dengan pengembangan sektor perkebunan sawit, seperti program peremajaan sawit rakyat, program peningkatan sarana dan prasarana perkebunan sawit dan lainnya. Skenario kedua, dana perkebunan sawit sebesar Rp 5,85 triliun digunakan untuk membiayai program yang terkait langsung dengan pengembangan sektor perkebunan sawit, seperti program peremajaan sawit rakyat, program peningkatan sarana dan prasarana perkebunan sawit dan lainnya.

Skenario ketiga, dana perkebunan sawit sebesar Rp 11,7 triliun digunakan untuk membiayai subsidi biodiesel. Skenario keempat, dana perkebunan sawit sebesar Rp 5,85 triliun digunakan untuk membiayai subsidi biodiesel. Skenario kelima, dana perkebunan sawit sebesar Rp 5,85 triliun digunakan untuk subsidi biodiesel dan sebesar Rp 5,85 triliun digunakan untuk membiayai program yang terkait langsung dengan pengembangan sektor perkebunan sawit, seperti program peremajaan sawit rakyat, program peningkatan sarana dan prasarana perkebunan sawit dan lainnya.

2.4 Budget Tagging

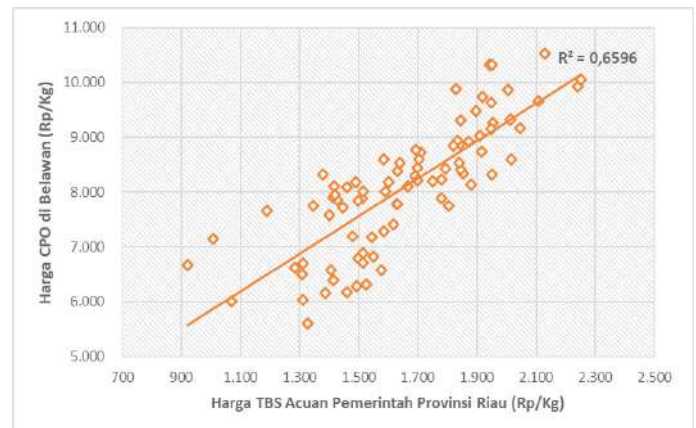
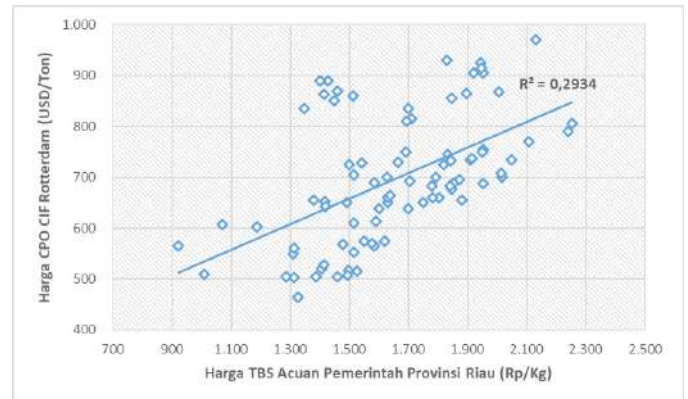
Pendekatan budget tagging dilakukan untuk melihat sejauhmana program dan alokasi anggaran fungsi perkebunan yang dikelola oleh Dinas Perkebunan di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Kami melakukan penelusuran terhadap daftar isian program dan anggaran (DIPA) di dua dinas tersebut. Semua program dan anggaran selanjutnya kami tandai (tagging) dan dikluster berdasarkan dampak langsung, dampak tidak langsung dan tidak berdampak.

3. TEMUAN

3.1 Penetapan Harga TBS di Tingkat Petani belum Berpihak kepada Petani Sawit

Harga TBS di tingkat petani ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Indeks K yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Meski demikian, penentuan Indeks K hanya mempertimbangkan biaya produksi dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS), bukan berdasarkan biaya produksi dari petani.

Dampaknya adalah banyak biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi TBS masuk ke dalam perhitungan Indeks K, seperti bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang, overhead kebun plasma, penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi dan biaya-biaya lain yang sebenarnya tidak relevan menjadi biaya produksi di PKS. Hal tersebut menyebabkan petani sangat dirugikan, karena harga TBS menjadi lebih rendah dari semestinya. Lebih rinci, Hubungan antara Harga CPO dan Harga TBS Acuan Pemerintah Provinsi Riau dan Kalbar dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hubungan antara Harga CPO dan Harga TBS Acuan Pemerintah Provinsi Riau dan Kalbar, 2013-2019

Penentuan Indeks K harus dihadiri oleh perwakilan pemerintah, perwakilan dari asosiasi petani sawit dan dari pihak perusahaan sawit. Proses penentuan harga TBS dan Indeks K didasarkan dari parameter penentuan kualitas TBS yang diambil dari sample TBS di perusahaan – perusahaan di kabupaten tersebut. Saat ini indeks K di Kalbar cenderung membaik yaitu menuju angka 90. Penentuan nilai indeks K Kalbar tersebut diikuti oleh gabungan asosiasi petani sawit dan perusahaan sawit.

Dari 110 PKS yang diundang, rata-rata yang hadir hanya 37 perusahaan dalam rapat penentuan harga TBS⁷.

Penetapan harga TBS oleh pemerintah daerah tidak menjamin harga penetapan tersebut terealisasi di tingkat petani. Di lapangan, harga acuan pemerintah tersebut tidak diterapkan, karena berbagai alasan, seperti kualitas TBS petani tidak sesuai spesifikasi, karena kadar airnya tinggi dan sebagainya. Padahal, penetapan itu dilakukan sepihak oleh perusahaan. Pada kondisi tersebut, nilai tawar petani sangat rendah terhadap perusahaan. Sehingga, petani menerima saja semua keputusan perusahaan.

Kasus tersebut berlaku pada petani swadaya sawit yang tidak bermitra dengan PKS atau tidak didasari dari MoU antara petani dan PKS. Hal tersebut dituturkan langsung oleh Kadisbun Kalbar. Apabila ada pekebun mandiri tidak tergabung dalam kemitraan atau dalam sistem MoU maka kemungkinan adanya permainan harga dapat terjadi dan itu diluar lokus kerja Dinas Perkebunan (Disbun). Yang menjadi tanggung jawab disbun adalah subjek subjek yang berada di bawah naungan sistem tata niaga yang berjalan sesuai aturan. Apabila ada kecurangan dalam sistem tata niaga yang berada di bawah tanggung jawab Disbun Kalbar maka akan ada pengawasan berjenjang mulai dari kabupaten hingga provinsi yang akan memberikan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin.

Selain itu, terdapat rantai distribusi yang panjang antara petani dengan PKS. Petani tidak bisa mengakses langsung PKS, tapi melewati beberapa mata rantai pemasaran, seperti pengepul, agen dan pemegang delivery order (DO). Mata rantai pemasaran yang panjang tersebut menyebabkan harga di tingkat petani jauh dibanding harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di lapangan juga terjadi pemotongan harga mencapai 2,5% dari harga yang diterima petani. Pemotongan harga ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memegang kendali pemasaran.

3.2 Penggunaan Dana Perkebunan Sawit belum Memberikan Dampak terhadap Kesejahteraan Petani Sawit

Dana perkebunan sawit yang seharusnya digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan pengembangan perkebunan sawit, seperti program peremajaan sawit rakyat, program pengembangan sarana dan prasarana perkebunan sawit, program peningkatan sumber daya manusia di sektor perkebunan sawit dan sebagainya, ternyata digunakan untuk program subsidi biodiesel. Berdasarkan data KPK (2017), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menghimpun dana perkebunan sawit dari hasil pungutan ekspor CPO dan produk turunannya sebesar Rp 11 triliun pada 2016. Dari besaran dana yang dihimpun tersebut, BPDPKS mengalokasikan sebesar 81,8% untuk subsidi biodiesel. Ada dua grup usaha, yaitu Wilmar Grup dan Musim Mas Grup yang mendapatkan alokasi terbesar dari subsidi biodiesel tersebut

Analisis input-output menunjukkan bahwa penggunaan dana perkebunan sawit untuk membiayai subsidi biodiesel tidak memberikan nilai manfaat besar terhadap keseimbangan faktor produksi dibandingkan menggunakannya untuk program yang berkaitan langsung dengan pengembangan sektor perkebunan sawit. Jika semua penerimaan dana perkebunan sawit digunakan untuk sektor perkebunan sawit maka pertumbuhan output produksi di sektor tersebut meningkat sebesar 6,52% dan juga mempengaruhi output produksi sektor lain, seperti faktor produksi tenaga kerja naik sebesar 0,59%, output faktor produksi rumah tangga juga meningkat sebesar 0,50%. Sedangkan, jika dana tersebut semuanya digunakan untuk subsidi biodiesel, hanya mampu meningkatkan output produksi sektor industri biodiesel sebesar 0,78%. Output produksi tenaga kerja hanya naik sebesar 0,45% dan output produksi rumah tangga hanya naik sebesar 0,41% (lihat tabel 1).

⁷Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat pada 23 Desember 2020

Tabel 1. Persentase Perubahan Dampak Injeksi Dana Alokasi BPDPKS terhadap Output Awal Sektor Produksi di Indonesia

Sektor Produksi	Skenario Pertumbuhan Output (%)				
	1	2	3	4	5
Faktor Produksi Tenaga Kerja	0,59	0,29	0,31	0,15	0,45
Faktor Produksi Bukan Tenaga Kerja	0,32	0,16	0,38	0,19	0,35
Institusi Rumah Tangga	0,50	0,25	0,31	0,16	0,41
Institusi Perusahaan	0,32	0,16	0,37	0,18	0,34
Institusi Pemerintah	0,23	0,11	0,25	0,12	0,24
Sektor Produksi Lainnya*	0,29	0,15	0,21	0,10	0,25
Sektor Produksi Perkebunan Sawit**	6,52	3,26	0,47	0,23	3,49
Sektor Produksi Industri Biodiesel***	0,32	0,16	1,23	0,61	0,78
Margin Perdagangan dan Pengangkutan	0,37	0,18	0,24	0,12	0,30
Komoditas Domestik	0,30	0,15	0,21	0,11	0,26
Komoditas Impor	0,09	0,05	0,09	0,05	0,09

Ket:

*Selain sektor perkebunan sawit dan industri biodiesel

**Sektor Produksi Pertanian Tanaman Lainnya (termasuk sawit di dalamnya)

***Sektor Produksi Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat dan Semen (termasuk biodiesel di dalamnya)

Sumber: Tabel SNSE 2008, diolah.

Tujuan dari penghimpunan dana perkebunan sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sesuai dengan mandat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak terealisasi. Pemerintah mendorong peningkatan harga CPO dengan melakukan pungutan ekspor terhadap ekspor CPO dan produk turunannya. Di mana dana dari hasil pungutan tersebut digunakan untuk membiayai subsidi biodiesel. Hal tersebut dilakukan agar produksi biodiesel di dalam negeri meningkat sehingga mampu menyerap produksi CPO. Meningkatnya permintaan CPO akan mampu mendorong harga CPO dan implikasi lainnya, harga TBS di tingkat petani meningkat. Pada akhirnya, akan meningkatkan nilai tukar petani (NTP) sawit.

Ternyata hal tersebut tidak terjadi. Harga CPO di dalam negeri tidak mengalami peningkatan signifikan dan cenderung berfluktuasi. Misalnya, pada 2014, rata-rata harga CPO berdasarkan harga acuan Belawan dan Dumai sebesar Rp 9.084/Kg. Harga tersebut sebelum pemerintah melakukan pungutan ekspor. Setelah, pungutan ekspor dilakukan pada 2015, harga CPO lebih

rendah dibanding harga sebelum pungutan ekspor. Bahkan, pada 2019, harga turun menjadi Rp 6.829/Kg (lihat tabel 2).

Penurunan harga CPO tersebut berdampak terhadap harga TBS di tingkat petani. Berdasarkan, harga TBS acuan dari Pemerintah Provinsi Riau, pada 2014, harga mencapai Rp 1.826/Kg. Harga tersebut turun menjadi Rp 1.515/Kg. Penurunan harga tersebut berdampak terhadap penurunan NTP perkebunan rakyat. Pada 2014, NTP sebesar 97,0, sedangkan pada 2019 turun menjadi 95,6. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Jika NTP kurang dari 100, menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani dari hasil produksi, lebih rendah dari pengeluaran petani untuk konsumsi.

Tabel 2. Harga TBS, CPO dan Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat, 2013-2019

Tahun	Harga TBS Acuan Pemerintah Provinsi Riau (Rp/Kg)	Harga CPO Belawan (Rp/Kg)	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat
2013	1.557	8.331	95,4
2014	1.826	9.085	97,0
2015	1.319	7.504	95,2
2016	1.756	8.352	98,0
2017	1.946	8.787	103,0
2018	1.640	7.708	98,0
2019	1.515	6.829	95,6

3.3 Belum Ada Mekanisme Kebijakan dan Program yang Komprehensif dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat

Dua provinsi ini merupakan penghasil sawit terbesar di Indonesia dan memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap komoditas perkebunan monokultur ini serta kontribusi petani sawit rakyat sangat tinggi. Meski demikian, isu strategis terkait kesejahteraan petani sawit belum menjadi agenda strategis dalam program pembangunan daerah.

Faktanya, peningkatan kesejahteraan petani bukan menjadi program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024. Di dalam dokumen perencanaan tersebut, pemerintah daerah hanya mengatur soal produktivitas lahan.



Di mana sasarannya baru sebatas menargetkan peningkatan produksi dan produktivitas sawit melalui indikator jumlah produksi dan produktivitas untuk satuan luas lahan.

Padahal, persoalan utama dari tata kelola perkebunan sawit di Riau adalah persoalan rendahnya kesejahteraan petani sawit, terutama petani gurem yang hanya memiliki lahan kurang dari 2 hektare. Selain itu, rendahnya kesejahteraan petani tersebut juga disebabkan oleh persoalan legalitas lahan, sumber daya manusia, harga pupuk yang tinggi dan permodalan (Bronkhorst et al, 2017). Seharusnya, persoalan-persoalan ini harus menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi Riau untuk menyelesaikannya bersama pemerintah kabupaten/kota lainnya yang memiliki areal perkebunan sawit.

Akibatnya, pada rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Riau tidak tertulis secara spesifik program peningkatan kesejahteraan bagi petani sawit. Beberapa kegiatan yang tercantum misalnya untuk kegiatan peremajaan (replanting) hanya difokuskan untuk kebun karet. Selain itu, untuk kegiatan peningkatan akses kemitraan petani hanya ditujukan petani kelapa.

Lebih lanjut, setidaknya, terdapat 3 kegiatan dengan target dan sasaran yang tidak sesuai dalam Rencana Kerja Dinas Perkebunan Riau. Pertama, kegiatan intensifikasi tanaman perkebunan dengan target 200 Ha. Tapi, tidak tercantum secara terperinci sasaran intensifikasi dalam

bentuk peningkatan produktivitas kebun. Kedua, kegiatan pembinaan, pengawasan dan penataan izin usaha perkebunan yang memiliki target dan sasaran berupa jumlah izin perusahaan yang diterbitkan, hal ini justru keliru, dan tidak sesuai dengan Inpres No. 8 terkait Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Ketiga, terdapat kegiatan pembinaan dan pengadaan alat paska panen dan pengolahan hasil perkebunan, namun target dan kegiatan ini hanya berupa pembelian 4 alat pengolahan hasil produk perkebunan.

Di Provinsi Kalimantan Barat, peningkatan kesejahteraan petani sudah masuk ke dalam program prioritas dalam RPJMD 2018-2023. Ada dua aspek yang mau diperbaiki oleh pemerintah daerah, yaitu peningkatan produktivitas dan NTP perkebunan rakyat. Selanjutnya, pemerintah daerah menetapkan indikator yang ingin dicapai selama kurun waktu 2018-2023, antara lain: (1) Pertumbuhan PDRB sektor perkebunan dari baseline 4% menjadi 4,67% di tahun 2023; (2) jumlah produksi perkebunan dari baseline 2.639.538 ton menjadi 3.985.958 ton di tahun 2023; dan (3) NTP Perkebunan Rakyat dari baseline 94,44 menjadi 100 di tahun 2023. Meski demikian, pada realitasnya, tujuan tersebut akan sulit dicapai karena tidak teralisasi dalam rencana kerja program dan rencana kerja anggaran pemerintah daerah.

Dalam Renstra dan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, tidak disebutkan adanya kegiatan peningkatan kesejahteraan petani sawit. Ada kegiatan pada 2018 mengenai pengembangan perkebunan rakyat. Namun, program dan alokasi anggarannya justru digunakan untuk pengembangan perkebunan karet rakyat, perkebunan lada rakyat, perkebunan kelapa rakyat, dan perkebunan kopi rakyat. Tidak ada program khusus terkait perkebunan sawit rakyat. Pada 2020, ada program untuk pengembangan perkebunan sawit, tapi lebih pada kegiatan pembinaan perkembangan perkebunan sawit berkelanjutan berupa sertifikasi ISPO. Dan anehnya, kegiatan ini hanya dilakukan untuk perusahaan, bukan terhadap kelompok petani sawit atau koperasi petani sawit. Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sertifikasi ISPO wajib dipenuhi oleh petani pada 2025.

Hasil budget tagging terhadap penggunaan anggaran perkebunan di kedua provinsi tersebut menemukan tidak efektifnya penggunaan anggaran belanja fungsi perkebunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit. Misalnya, di Riau, anggaran yang berada pada Dinas Perkebunan Riau tidak proporsional secara kualitas. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya anggaran dan realisasi belanja yang memiliki dampak secara langsung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit.

Alokasi anggaran fungsi perkebunan yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan petani hanya sebesar 25% pada 2020. Di mana sebagian besar anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang tidak memiliki dampak sama sekali, yang jumlahnya mencapai 66%. Besaran anggaran tersebut digunakan justru untuk sosialisasi, rapat-rapat koordinasi, penyediaan jasa administrasi kantor, serta penyediaan keamanan dan peralatan kantor yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan petani sawit.

Persoalan yang sama juga ditemui di Kalimantan Barat. Anggaran fungsi perkebunan yang berada pada Dinas Perkebunan Kalimantan Barat juga tidak proporsional secara kualitas. Faktanya, rendahnya anggaran dan realisasi belanja terhadap kegiatan yang memiliki dampak secara langsung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Alokasi anggaran terhadap kegiatan yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan petani hanya sebesar 10,4% pada 2020. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang tidak memiliki dampak sama sekali terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit, yang jumlahnya mencapai 76,5%.

Besaran anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program seperti program peningkatan pengelolaan aset; program peningkatan pengembangan sistem pelaporan; capaian kinerja dan keuangan; program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; program peningkatan disiplin aparatur; program peningkatan sarana dan prasarana Dinas itu sendiri; hingga program pelayanan administrasi perkantoran yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan petani sawit.

Tabel 3. Hasil Budget Tagging Anggaran Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit Provinsi Riau, 2020-2021

Klasifikasi Dampak Anggaran	Tahun	
	2020	2021
Total Alokasi Anggaran (Rp)	7.546.172.640	9.778.964.905
Langsung (Rp/%)	1.850.425.209 (25%)	2.135.467.730 (22%)
Tidak Berdampak Langsung- Jangka Panjang (Rp/%)	716.540.000 (9%)	2.288.194.000 (23%)
Tidak Berdampak (Rp/%)	4.979.207.431 (66%)	5.355.303.175 (55%)

Tabel 4. Hasil Budget Tagging Anggaran Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit Provinsi Kalimantan Barat, 2020-2021

Klasifikasi Dampak Anggaran	Tahun	
	2020	2021
Total Alokasi Anggaran (Rp)	14.637.500.000	16.140.996.800
Langsung (Rp/%)	1.523.000.000 (10,4%)	1.523.575.000 (9,5%)
Tidak Berdampak Langsung- Jangka Panjang (Rp/%)	1.921.000.000 (13,1%)	2.005.369.000 (12,4%)
Tidak Berdampak (Rp/%)	11.193.500.000 (76,5%)	12.612.052.800 (78,1%)

4. REKOMENDASI

Dari temuan di atas, diperlukan strategi kebijakan untuk memperbaiki kesejahteraan petani sawit melalui pengelolaan harga TBS dan dana perkebunan sawit. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian perlu perbaikan terhadap formula penetapan harga TBS di tingkat petani dari hanya menggunakan pendekatan biaya produksi pada level Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi kombinasi antara biaya produksi pada level PKS dan biaya produksi pada level petani. Ini penting karena seringkali ketika terjadi penurunan harga, biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani lebih besar dibandingkan harga. Sehingga, petani mengalami kerugian. Pada saat itu, banyak TBS yang tidak dipanen oleh petani. Dampaknya terjadi penurunan kualitas tanaman;

2. Kementerian Pertanian perlu menyusun matriks penentuan harga TBS berdasarkan kualitas TBS sebagai referensi resmi yang dikeluarkan melalui revisi Permentan No. 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga TBS. Di lapangan, acuan harga hanya pada umur tanaman dan kualitas kandungan minyak sawit dari TBS. Tapi, itu hanya ditetapkan sepihak oleh pabrik kelapa sawit, tanpa dilakukan pengujian terhadap TBS tersebut. Seringkali terjadi perselisihan antara petani dan pengepul/agen/pabrik kelapa sawit terkait kualitas TBS tersebut. Dalam perselisihan ini, petani yang selalu mengalami kerugian karena tidak punya posisi tawar dalam menentukan kualitas dan harga TBS;

3. Pertanian perlu menyusun skema khusus lewat Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan penetapan harga yang linear antara kenaikan harga CPO dan Indeks K. Pada banyak kasus, kenaikan harga TBS tidak elastis dengan kenaikan harga CPO. Misalnya, ketika harga CPO naik 10%, kenaikan harga TBS berdasarkan harga penetapan oleh Gubernur hanya naik 5%. Sedangkan, saat harga CPO turun 5%, harga TBS jatuh sebesar 10%. Ini tentu merugikan petani. Oleh karena itu, perlu skema harga yang linear dan elastis antara harga CPO dan harga TBS

4. Pemerintah Provinsi Riau dan Kalimantan Barat perlu melakukan perbaikan kelembagaan petani yang diakui oleh hukum formal pada level kabupaten/kota agar

memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan cara menjalin kemitraan usaha dengan perusahaan dalam penentuan harga TBS. Dalam penetapan harga TBS seringkali posisi tawar petani lebih rendah dibanding perusahaan. Hal tersebut terjadi karena belum banyak petani yang memiliki kelembagaan formal. Mereka bertindak secara individu dalam pasar. Hal ini perlu diperbaiki. Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan petani agar posisi mereka dalam rantai pasok minyak sawit menjadi lebih kuat;

5. Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat perlu melakukan monitoring harga TBS secara berkala, terutama pada penetapan harga TBS yang secara sepihak ditetapkan oleh perusahaan. Penegakan hukum perlu dilakukan bagi perusahaan/pabrik kelapa sawit yang melakukan praktek curang terhadap harga TBS. Dinas Perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota perlu secara periodic melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan harga acuan TBS, agar tidak terjadi penetapan harga oleh perusahaan/pabrik kelapa sawit yang tidak sesuai dengan harga acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah;

6. Badan Pengarah BDPKS perlu mengubah strategi penggunaan dana perkebunan sawit agar fokus pada perbaikan kesejahteraan petani, seperti program peremajaan sawit rakyat, peningkatan sarana dan prasarana perkebunan sawit, dan peningkatan SDM petani sawit. Hal ini penting dilakukan agar mandat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bisa direalisasikan dengan baik. Di mana dalam regulasi tersebut diatur penggunaan dana perkebunan sawit untuk program peremajaan sawit rakyat, peningkatan sarana dan prasarana perkebunan sawit, dan peningkatan SDM petani sawit. Oleh karena itu, Badan Pengarah BDPKS perlu meningkatkan alokasi penggunaan dana perkebunan sawit untuk kegiatan-kegiatan tersebut;

7. Badan Pelaksana BPDPKS perlu memperbaiki skema penyaluran dana untuk program peremajaan sawit rakyat yang berbasis pada data yang valid (spasial dan numerik), memangkas proses birokrasi yang panjang, seperti proses rekomendasi teknis yang bertingkat dan verifikasi calon penerima. Selama ini, realisasi program peremajaan sawit rakyat jauh dari target. Hal tersebut terjadi karena belum adanya keberpihakan dari pemerintah dan BPDPKS dalam pengalokasian anggaran. Selain itu, pelaksanaan program terhambat dengan minimnya data kepemilikan kebun sawit rakyat yang sudah tidak produktif. Sehingga, dalam menyusun program banyak yang tidak tepat sasaran. Selain itu, ada persoalan dalam penyaluran dana. Di mana, prosesnya tidak hanya ribet bagi petani sawit, tapi juga sangat birokratis. Hal-hal tersebut perlu diperbaiki agar program peremajaan sawit rakyat ini bisa berjalan dengan baik;

8. Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Kalimantan Barat menyusun program-program yang berorientasi pada pengembangan sektor perkebunan sawit berkelanjutan yang berbasis pada pengembangan kebun sawit rakyat, seperti penerbitan STDB untuk percepatan legalitas petani, peremajaan sawit rakyat, peningkatan akses terhadap bibit unggul yang bersertifikat dan pupuk subsidi penguatan sertifikasi ISPO. Sebagai sektor yang strategis bagi pembangunan daerah, seharusnya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah dan panjang, program-program pengembangan sektor perkebunan sawit harus menjadi program strategis daerah. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan perlu mendorong agar, sektor perkebunan sawit menjadi sektor strategis daerah, terutama dalam pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan dengan fokus pada perkebunan sawit rakyat;

9. Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Kalimantan mengalokasikan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit, seperti penerbitan STDB untuk percepatan legalitas petani, peremajaan sawit rakyat, peningkatan akses terhadap bibit unggul yang bersertifikat dan pupuk subsidi, penguatan sertifikasi ISPO. Konsekwensi dari perbaikan tata kelola dari sisi pemerintah daerah adalah perlunya alokasi anggaran yang memadai agar tujuan dari perbaikan tata kelola tersebut bisa dicapai. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi sangat penting. Selain ketersediaan anggaran, diperlukan juga strategi penggunaan anggaran yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Karena, perbaikan tata kelola tidak ada artinya tanpa peningkatan kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2008. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2008. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bronkhorst E, Cavallo E, van Dorth tot Medler M-M et al. 2017. Current practices and innovations in smallholder palm oil finance in Indonesia and Malaysia: Long-term financing solutions to promote sustainable supply chains. Occasional Paper 177. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Daemeter Consulting (2015): Indonesian oil palm smallholder farmers: A typology of organizational models, needs, and investment opportunities. Daemeter Consulting, Bogor, Indonesia.
- Nazarra S. 2005. Analisis input output: Edisi Kedua. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nurfatriani F, Ramawati, Sari GK dan Komarudin H. 2018. Optimalisasi dana sawit dan pengaturan instrumen fiskal penggunaan lahan hutan untuk perkebunan dalam upaya mengurangi deforestasi. Working Paper 238. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Santika T, Wilson KA, Budiharta S et al. 2019. Does oil palm agriculture help alleviate poverty? A multidimensional counterfactual assessment of oil palm development in Indonesia. World Development 120. doi: 10.1016/j.worlddev.2019.04.012.
- Saputra W. 2018. Fakta semu ekonomi sawit. Dapat didownload pada: <https://kolom.tempo.co/read/1095165/fakta-semu-ekonomi-sawit>
- Sudaryono. 2019. Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan mix method: Edisi kedua. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo.

LAMPIRAN 1
Matriks Rekomendasi

PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITERIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
1. Penentuan harga TBS berdasarkan rumus yang ditetapkan pemerintah kurang berkeadilan bagi petani	1. Adanya rumus Indeks K yang lebih berkeadilan bagi petani sawit 2. Adanya komponen biaya produksi petani dalam penetapan harga TBS	1. Terbitnya Peraturan Menteri terkait dengan pergantian rumus perhitungan harga TBS dan memasukkan elemen kualitas TBS petani dalam rumus perhitungan harga	1. Perlu perbaikan terhadap formula penetapan harga TBS di tingkat petani dari hanya menggunakan pendekatan biaya produksi pada level Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi kombinasi antara biaya produksi pada level PKS dan biaya produksi pada level petani	Kementerian Pertanian Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Provinsi; • Dinas Perkebunan Provinsi; • Tim penetapan Indeks K di Provinsi
		2. Adanya matriks resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan spektrum penentuan harga TBS berdasarkan kualitas TBS (rendemen, ALB, indeks memar buah)	2. Perlu adanya matriks penentuan harga TBS berlandaskan kualitas TBS sebagai referensi resmi yang dikeluarkan melalui revisi Permentan No.1 Tahun 2018 tentang penetapan harga TBS	Kementerian Pertanian Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Provinsi; • Dinas Perkebunan Provinsi • Tim penetapan Indeks K di Provinsi
		3. Semua petani swadaya berada di bawah kelembagaan yang baik dan dilindungi di bawah payung hukum			

LAMPIRAN 1
Matriks Rekomendasi

PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITERIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
			3. Perlu adanya skema khusus lewat Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan penetapan harga yang linear antara kenaikan harga CPO dan Indeks K secara signifikan	Kementerian Pertanian Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Provinsi; • Dinas Perkebunan Provinsi; • Tim penetapan Indeks K di Provinsi
			4. Perbaiki kelembagaan petani yang diakui oleh hukum formal pada level kabupaten/kota agar memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan cara menjalin kemitraan usaha dengan perusahaan dalam penentuan harga TBS	Bupati	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah Provinsi; • Dinas Perkebunan Provinsi • Tim penetapan Indeks K di Provinsi
			5. Perlu adanya monitoring harga TBS yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Provinsi, terutama pada penetapan harga TBS yang secara sepihak ditetapkan oleh perusahaan	Dinas Perkebunan Provinsi	

LAMPIRAN 1
Matriks Rekomendasi

PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITERIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
2. Kebijakan alokasi penggunaan dana perkebunan sawit belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani sawit	<p>3. 80% alokasi dana perkebunan sawit diperuntukan secara langsung bagi perbaikan kesejahteraan petani sawit</p> <p>4. Selama lima tahun, seluruh kebun sawit rakyat yang sudah tidak produktif sudah dilakukan peremajaan</p>	<p>4. Dewan pengarah BPDPKS menetapkan penggunaan dana perkebunan sawit untuk program peremajaan sawit rakyat, peningkatan sarana dan prasarana perkebunan sawit, dan peningkatan SDM petani sawit sebagai program prioritas dalam rencana strategis pengelolaan dana perkebunan sawit</p> <p>5. Dewan pengarah menetapkan alokasi 80% penggunaan dana perkebunan sawit untuk perbaikan kesejahteraan petani sawit dalam Rencana Anggaran dan Belanja tahunan</p>	<p>6. Perlu mengubah strategi penggunaan peremajaan sawit rakyat yang berbasis pada data yang valid (spasial dan numerik), memangkas proses birokrasi yang dana perkebunan sawit agar fokus pada perbaikan kesejahteraan petani, seperti program peremajaan sawit rakyat, peningkatan sarana dan prasarana perkebunan sawit, dan peningkatan SDM petani sawit</p> <p>7. BPDPKS perlu memperbaiki skema penyaluran dana untuk program</p>	Dewan Pengarah BPDPKS	Manajemen BPDPKS

LAMPIRAN 1
Matriks Rekomendasi

PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITERIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
3. Isu strategis terkait kesejahteraan petani sawit belum diturunkan secara konkret dalam indikator program perencanaan pembangunan daerah sehingga berdampak terhadap minimnya program dan anggaran terkait perkembangan sektor perkebunan sawit, khususnya untuk petani sawit	<p>5. Adanya agenda penerbitan STDB untuk percepatan legalitas petani dalam rencana strategis Dinas Perkebunan</p> <p>6. Adanya agenda peremajaan sawit rakyat dalam rencana strategis Dinas Perkebunan</p> <p>7. Adanya agenda peningkatan akses petani sawit terhadap bibit unggul dan pupuk subsidi dalam rencana strategis Dinas Perkebunan</p>	6. Dinas Perkebunan memperbaiki rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran yang berbasis pada pengembangan sektor perkebunan sawit yang berkelanjutan dengan fokus utama pada perkebunan sawit rakyat	8. Dinas perkebunan menyusun program-program yang berorientasi pada pengembangan sektor perkebunan sawit berkelanjutan yang berbasis pada pengembangan kebun sawit rakyat, seperti penerbitan STDB untuk percepatan legalitas petani, peremajaan sawit rakyat, peningkatan akses terhadap bibit unggul yang bersertifikat dan pupuk subsidi, penguatan sertifikasi ISPO	Dinas Perkebunan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi • Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi • Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

LAMPIRAN 1
Matriks Rekomendasi

PERMASALAHAN	TARGET	INDIKATOR KRITERIA	REKOMENDASI	PIC	INSTITUSI TERKAIT
	8. Adanya agenda peningkatan pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan melalui sistem sertifikasi ISPO bagi petani sawit				
4. Tidak efektifnya penggunaan anggaran belanja fungsi perkebunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit	9. Adanya anggaran Dinas Perkebunan terkait kesejahteraan petani sawit yang lebih berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani sawit	7. 50% total anggaran Dinas Perkebunan ditujukan untuk kegiatan berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit	9. Dinas Perkebunan mengalokasikan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit, seperti penerbitan STDB untuk percepatan legalitas petani, peremajaan sawit rakyat, peningkatan akses terhadap bibit unggul yang bersertifikat dan pupuk subsidi, penguatan sertifikasi ISPO	Dinas Perkebunan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi • Badan Pendapatan Daerah Provinsi • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah • DPRD Provinsi

Lampiran B

Tabel B1. Skenario 1: Injeksi Dana Alokasi BDPKS sebesar Rp 11,7 Triliun ke Sektor Produksi Perkebunan Sawit

Sektor Produksi	Output Awal (Rp Milyar)	Output Setelah Shock (Rp Milyar)	Perubahan Output (Rp Milyar)	Pertumbuhan (%)
Faktor Produksi Tenaga Kerja	2.694.324,95	2.710.203,88	15.878,93	0,59%
Faktor Produksi Bukan Tenaga Kerja	2.470.974,96	2.478.970,26	7.995,30	0,32%
Institusi Rumah Tangga	3.826.444,53	3.845.634,82	19.190,29	0,50%
Institusi Perusahaan	1.916.701,71	1.922.801,81	6.100,10	0,32%
Institusi Pemerintah	1.264.033,42	1.266.926,88	2.893,46	0,23%
Sektor Produksi Lainnya*	9.010.132,14	9.036.377,69	26.245,55	0,29%
Sektor Produksi Perkebunan Sawit**	202.251,11	215.445,29	13.194,18	6,52%
Sektor Produksi Industri Biodiesel***	1.162.701,21	1.166.430,16	3.728,95	0,32%
Margin Perdagangan dan Pengangkutan	1.006.991,64	1.010.673,38	3.681,74	0,37%
Komoditas Domestik	11.797.337,77	11.833.192,24	35.854,47	0,30%
Komoditas Impor	5.391.862,33	5.396.818,04	4.955,71	0,09%

Ket: *Selain sektor perkebunan sawit dan industri biodiesel

**Sektor Produksi Pertanian Tanaman Lainnya (termasuk sawit di dalamnya)

***Sektor Produksi Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat dan Semen (termasuk biodiesel di dalamnya)

Sumber: Tabel SNSE 2008, diolah

Tabel B2. Skenario 2: Injeksi Dana Alokasi BDPKS sebesar Rp 5,85 Triliun ke Sektor Produksi Perkebunan Sawit

Sektor Produksi	Output Awal (Rp Milyar)	Output Setelah Shock (Rp Milyar)	Perubahan Output (Rp Milyar)	Pertumbuhan (%)
Faktor Produksi Tenaga Kerja	2.694.324,95	2.702.264,42	7.939,47	0,29%
Faktor Produksi Bukan Tenaga Kerja	2.470.974,96	2.474.972,61	3.997,65	0,16%
Institusi Rumah Tangga	3.826.444,53	3.836.039,68	9.595,15	0,25%
Institusi Perusahaan	1.916.701,71	1.919.751,76	3.050,05	0,16%
Institusi Pemerintah	1.264.033,42	1.265.480,15	1.446,73	0,11%
Sektor Produksi Lainnya*	9.010.132,14	9.023.254,91	13.122,77	0,15%
Sektor Produksi Perkebunan Sawit**	202.251,11	208.848,20	6.597,09	3,26%
Sektor Produksi Industri Biodiesel***	1.162.701,21	1.164.565,68	1.864,47	0,16%
Margin Perdagangan dan Pengangkutan	1.006.991,64	1.008.832,51	1.840,87	0,18%
Komoditas Domestik	11.797.337,77	11.815.265,01	17.927,24	0,15%
Komoditas Impor	5.391.862,33	5.394.340,18	2.477,85	0,05%

Ket: *Selain sektor perkebunan sawit dan industri biodiesel

**Sektor Produksi Pertanian Tanaman Lainnya (termasuk sawit di dalamnya)

***Sektor Produksi Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat dan Semen (termasuk biodiesel di dalamnya)

Sumber: Tabel SNSE 2008, diolah

Tabel B3. Skenario 3: Injeksi Dana Alokasi BDPKS sebesar Rp 11,7 Triliun ke Sektor Produksi Industri Biodiesel

Sektor Produksi	Output Awal (Rp Milyar)	Output Setelah Shock (Rp Milyar)	Perubahan Output (Rp Milyar)	Pertumbuhan (%)
Faktor Produksi Tenaga Kerja	2.694.324,95	2.702.562,21	8.237,26	0,31%
Faktor Produksi Bukan Tenaga Kerja	2.470.974,96	2.480.455,76	9.480,80	0,38%
Institusi Rumah Tangga	3.826.444,53	3.838.476,23	12.031,70	0,31%
Institusi Perusahaan	1.916.701,71	1.923.793,03	7.091,32	0,37%
Institusi Pemerintah	1.264.033,42	1.267.154,32	3.120,90	0,25%
Sektor Produksi Lainnya*	9.010.132,14	9.028.961,01	18.828,87	0,21%
Sektor Produksi Perkebunan Sawit**	202.251,11	203.191,91	940,80	0,47%
Sektor Produksi Industri Biodiesel***	1.162.701,21	1.176.997,67	14.296,46	1,23%
Margin Perdagangan dan Pengangkutan	1.006.991,64	1.009.376,47	2.384,83	0,24%
Komoditas Domestik	11.797.337,77	11.822.609,34	25.271,57	0,21%
Komoditas Impor	5.391.862,33	5.396.973,89	5.111,56	0,09%

Ket: *Selain sektor perkebunan sawit dan industri biodiesel

**Sektor Produksi Pertanian Tanaman Lainnya (termasuk sawit di dalamnya)

***Sektor Produksi Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat dan Semen (termasuk biodiesel di dalamnya)

Sumber: Tabel SNSE 2008, diolah

Tabel B4. Skenario 4: Injeksi Dana Alokasi BDPKS sebesar Rp 5,85 Triliun ke Sektor Produksi Industri Biodiesel

Sektor Produksi	Output Awal (Rp Milyar)	Output Setelah Shock (Rp Milyar)	Perubahan Output (Rp Milyar)	Pertumbuhan (%)
Faktor Produksi Tenaga Kerja	2.694.324,95	2.698.443,58	4.118,63	0,15%
Faktor Produksi Bukan Tenaga Kerja	2.470.974,96	2.475.715,36	4.740,40	0,19%
Institusi Rumah Tangga	3.826.444,53	3.832.460,38	6.015,85	0,16%
Institusi Perusahaan	1.916.701,71	1.920.247,37	3.545,66	0,18%
Institusi Pemerintah	1.264.033,42	1.265.593,87	1.560,45	0,12%
Sektor Produksi Lainnya*	9.010.132,14	9.019.546,57	9.414,43	0,10%
Sektor Produksi Perkebunan Sawit**	202.251,11	202.721,51	470,40	0,23%
Sektor Produksi Industri Biodiesel***	1.162.701,21	1.169.849,44	7.148,23	0,61%
Margin Perdagangan dan Pengangkutan	1.006.991,64	1.008.184,06	1.192,42	0,12%
Komoditas Domestik	11.797.337,77	11.809.973,56	12.635,79	0,11%
Komoditas Impor	5.391.862,33	5.394.418,11	2.555,78	0,05%

Ket: *Selain sektor perkebunan sawit dan industri biodiesel

**Sektor Produksi Pertanian Tanaman Lainnya (termasuk sawit di dalamnya)

***Sektor Produksi Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat dan Semen (termasuk biodiesel di dalamnya)

Sumber: Tabel SNSE 2008, diolah

Tabel B5. Skenario 5: Injeksi Dana Alokasi BDPKKS sebesar Rp 5,85 Triliun ke Sektor Produksi Industri Biodiesel dan Rp 5,85 Triliun ke Sektor Produksi Perkebunan Sawit

Sektor Produksi	Output Awal (Rp Milyar)	Output Setelah Shock (Rp Milyar)	Perubahan Output (Rp Milyar)	Pertumbuhan (%)
Faktor Produksi Tenaga Kerja	2.694.324,95	2.706.383,05	12.058,10	0,45%
Faktor Produksi Bukan Tenaga Kerja	2.470.974,96	2.479.713,01	8.738,05	0,35%
Institusi Rumah Tangga	3.826.444,53	3.842.055,53	15.611,00	0,41%
Institusi Perusahaan	1.916.701,71	1.923.297,42	6.595,71	0,34%
Institusi Pemerintah	1.264.033,42	1.267.040,60	3.007,18	0,24%
Sektor Produksi Lainnya*	9.010.132,14	9.032.669,35	22.537,21	0,25%
Sektor Produksi Perkebunan Sawit**	202.251,11	209.318,60	7.067,49	3,49%
Sektor Produksi Industri Biodiesel***	1.162.701,21	1.171.713,92	9.012,71	0,78%
Margin Perdagangan dan Pengangkutan	1.006.991,64	1.010.024,93	3.033,29	0,30%
Komoditas Domestik	11.797.337,77	11.827.900,79	30.563,02	0,26%
Komoditas Impor	5.391.862,33	5.396.895,96	5.033,63	0,09%

Ket: *Selain sektor perkebunan sawit dan industri biodiesel

**Sektor Produksi Pertanian Tanaman Lainnya (termasuk sawit di dalamnya)

***Sektor Produksi Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat dan Semen (termasuk biodiesel di dalamnya)

Sumber: Tabel SNSE 2008, diolah

Keterangan Agregat Kode SNSE

Kode Agregat SNSE	Keterangan dan Kode SNSE (105x105)
1	Faktor Produksi Tenaga Kerja Kode: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
2	Faktor Produksi Bukan Tenaga Kerja Kode:17
3	Institusi Rumah Tangga Kode: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
4	Institusi Perusahaan Kode: 26
5	Institusi Pemerintah Kode: 27
6	Sektor Produksi Lainnya Kode: 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50
7	Sektor Produksi Pertanian Tanaman Lainnya Kode: 29
8	Sektor Produksi Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat dan Semen Kode: 39
9	Margin Perdagangan dan Pengangkutan Kode: 52, 53
10	Komoditas Domestik Kode: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
11	Komoditas Impor Kode: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Lampiran C

Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Adapun rumusan perhitungan Harga pembelian TBS yakni:

$$HTBS(P) = K(P-1)\{(HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (HPK(P) \times RPK(Tab))\}$$

Besaran Indeks "K" sendiri diusulkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS yang dibentuk oleh Gubernur dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$K(P-1) = HTBS(P-1)/(HCPO(P-1) \times RCPO(Akt PKS)) + (HPK(P-1) \times RPK(Akt PKS)) \times 100\%$$

Tabel 1. Rendemen Tandan Buah Segar dan Inti Sawit Wilayah Provinsi Riau dan Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan /KB.120/1/2018

No	Umur Tanaman (Tahun)	Rendemen CPO (%)		Rendemen PK (%)	
		Rendemen CPO Riau (%)	Rendemen CPO Kalimantan Barat (%)	Rendemen PK Riau (%)	Rendemen PK Kalimantan Barat (%)
1	3	15,70	15,72	4,63	3,78
2	4	17,22	17,07	4,65	4,06
3	5	19,05	18,46	4,69	4,12
4	6	19,54	18,93	4,75	4,33
5	7	20,31	19,58	4,93	4,57
6	8	20,90	20,23	5,02	4,64
7	9	21,46	20,71	5,02	4,89
8	10 s.d 20	22,02	21,41	5,04	5,07
9	21	20,96	20,90	5,04	5,10
10	22	20,84	20,73	5,04	5,11
11	23	20,74	19,62	5,04	5,13
12	24	19,74	19,08	5,04	5,13
13	25	19,19	18,37	5,04	5,13

Lampiran D

Matriks Posisi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Riau dan Kalimantan Barat

Provinsi	Visi Misi Kepala Daerah	RPJMD 2019-2024	Renstra Dinas Perkebunan 2020-2024	Rencana Kerja Dinas Perkebunan 2020
Riau	<p>Visi: Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu).</p> <p>Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.</p>	<p>Tantangan pembangunan di sub-sektor perkebunan kelapa sawit: Peningkatan produktivitas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kesejahteraan petani sawit yang lebih besar.</p> <p>Sasaran dan program pembangunan pada sub-sektor perkebunan kelapa sawit: peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit melalui indikator jumlah produksi untuk satuan luas lahan.</p> <p>Catatan: Berbagai isu strategis lainnya terkait kesejahteraan petani seperti percepatan legalitas lahan, dan pengembangan kualitas SDM Pekebun belum diturunkan secara konkret dalam indikator program pembangunan daerah.</p>	<p>Permasalahan yang digarisbawahi pada sub sektor perkebunan kelapa sawit: Penggunaan bibit palsu (bibit yang tidak bersertifikat dan tidak bermutu), perubahan harga jual TBS dan perubahan iklim (kemarau) yang mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan</p> <p>Tujuan dan sasaran: meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani tanaman perkebunan melalui peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Perkebunan.</p> <p>Program Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan melalui 17 kegiatan. 2. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perkebunan melalui 3 kegiatan <p>Program Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluh Perkebunan <p>*Catatan kekurangan Tidak disebutkan secara spesifik program peningkatan kesejahteraan bagi petani sawit. Program peremajaan (replanting) dan peningkatan akses kemitraan petani hanya ditujukan petani kelapa. Selain itu, terdapat kegiatan "Intensifikasi tanaman perkebunan" namun dengan indikator luas tanaman perkebunan yang dipelihara seluas 200 Ha, tidak tercantum secara terperinci target intensifikasi khususnya peningkatan produktivitas kebun. Kemudian, terdapat kegiatan "Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan", namun indikator kegiatan ini hanya berupa pembelian 4 alat pengolahan hasil produk perkebunan.</p>

Lampiran D

Matriks Posisi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Riau dan Kalimantan Barat

<p>Kalimantan Barat</p>	<p>Visi: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.</p> <p>Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.</p>	<p>Tantangan pembangunan di sub-sektor perkebunan kelapa sawit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tingginya konflik khususnya terkait dengan status lahan; 2. industri hilirisasi produk perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah yang masih belum berkembang; 3. lambannya perkebunan besar dalam pembangunan infrastruktur pengolahan hasil perkebunan dan perkebunan plasma; serta 4. Rendahnya kualitas SDM yang bekerja di sektor perkebunan 5. NTP sektor perkebunan yang masih dibawah angka 100 <p>Sasaran dan program pembangunan pada sub-sektor perkebunan kelapa sawit:</p> <p>peningkatan produktivitas dan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat dengan indikator sebagai berikut: (1) Pertumbuhan PDRB sektor perkebunan ADHK dari baseline 4% menjadi 4,67% di tahun 2023; (2) jumlah produksi perkebunan dari baseline 2.639.538 ton menjadi 3.985.958 ton di tahun 2023; dan (3) NTP Perkebunan Rakyat dari baseline 94,44 menjadi 100 di tahun 2023</p>	<p>Permasalahan yang digaris-bawahi pada sub sektor perkebunan kelapa sawit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkebunan rakyat diusahakan pekebun secara subsistem (sekedar memenuhi kebutuhan sendiri) belum berorientasi bisnis, produktivitas di bawah potensi produksi dan menghasilkan produk bermutu rendah; 2) Capaian kinerja investasi perkebunan besar belum optimal, yang dicerminkan dari rendahnya realisasi pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil dan 3) kurangnya tenaga teknis dan fungsional perkebunan (Pengawas Benih, Pengendali OPT, PPNS) baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun lapangan. 4) Capaian produksi komoditas unggulan perkebunan (termasuk kelapa sawit) di Kalbar masih belum optimal untuk mendukung pencapaian sasaran produksi nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan; 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Pekebun; 3. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; 8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
--------------------------------	---	--	--	---

Lampiran D

Matriks Posisi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Riau dan Kalimantan Barat

Visi:	Catatan:	Tujuan dan sasaran:	*Catatan Kekurangan
<p>Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.</p> <p>Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera,</p> <p>yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.</p>	<p>isu strategis lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan petani sawit seperti konflik lahan, hilirisasi produk, lambannya perkebunan besar menjalankan kewajibannya, hingga pengembangan kualitas SDM sebagaimana dicantumkan dalam permasalahan dan isu strategis belum diturunkan secara konkret dalam indikator program pembangunan.</p>	<p>Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat.</p> <p>Program Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan; 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Pekebun <p>Program Penunjang, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 	<p>Tidak disebutkan adanya kegiatan peremajaan kelapa sawit bagi petani. Sebelumnya, pada Renja tahun 2018, terdapat kegiatan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Namun, di Program Peningkatan Produksi Perkebunan, hanya terdapat kegiatan Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat, Perkebunan Lada Rakyat, Perkebunan Kelapa Rakyat, dan Kebun Kopi Rakyat. Selain itu, pada Renja 2020, sasaran kegiatan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan berupa sertifikasi ISPO hanya menargetkan perusahaan saja</p>

Tabel Shock Skenario 1 (Injeksi Sektor Produksi Tanaman Lainnya sebesar 11,7 Triliun)

Kode SENSE	Shock (Rp Milyar)	Hasil (Rp Milyar)	Output Awal (Rp Milyar)	Persentase Terhadap Output Awal (%)	Permintaan Akhir (Rp Milyar)	Persentase Terhadap Permintaan Akhir (%)
1	-	2.562,83	131.127,84	1,95	131.127,84	1,95
2	-	534,67	35.006,16	1,53	35.006,16	1,53
3	-	5.789,11	387.957,53	1,49	387.957,53	1,49
4	-	423,80	40.419,47	1,05	40.419,47	1,05
5	-	548,55	220.335,48	0,25	220.335,48	0,25
6	-	1.058,01	413.958,41	0,26	413.571,65	0,26
7	-	364,25	132.047,46	0,28	132.047,46	0,28
8	-	354,12	120.263,76	0,29	120.263,76	0,29
9	-	402,88	92.286,63	0,44	92.286,63	0,44
10	-	1.491,39	435.131,74	0,34	434.457,76	0,34
11	-	511,19	150.447,17	0,34	150.447,17	0,34
12	-	759,54	226.526,38	0,34	226.526,38	0,34
13	-	270,82	70.180,93	0,39	70.180,93	0,39
14	-	653,26	192.172,92	0,34	191.526,47	0,34
15	-	57,48	13.012,00	0,44	13.012,00	0,44
16	-	97,04	33.451,07	0,29	33.451,07	0,29
17	-	7.995,30	2.470.974,96	0,32	2.464.317,45	0,32
18	-	1.347,16	176.756,68	0,76	172.929,91	0,78
19	-	6.099,04	731.562,84	0,83	714.539,55	0,85
20	-	2.073,54	494.234,22	0,42	478.880,67	0,43
21	-	1.100,48	173.151,85	0,64	167.655,39	0,66
22	-	2.797,72	468.454,50	0,60	466.115,37	0,60
23	-	2.121,75	710.495,47	0,30	695.076,86	0,31
24	-	786,90	243.905,48	0,32	241.567,31	0,33
25	-	2.863,70	827.883,49	0,35	826.173,60	0,35
26	-	6.100,10	1.916.701,71	0,32	1.892.524,80	0,32
27	-	2.893,46	1.264.033,42	0,23	916.802,45	0,32
28	-	2.707,09	468.256,54	0,58	467.369,02	0,58
29	11.700,00	13.194,18	202.251,11	6,52	202.251,11	6,52
30	-	1.493,59	265.105,49	0,56	265.105,49	0,56
31	-	83,94	52.221,85	0,16	52.221,85	0,16
32	-	883,13	182.474,58	0,48	182.376,85	0,48
33	-	776,57	610.107,14	0,13	610.107,14	0,13
34	-	65,79	82.053,44	0,08	82.053,44	0,08
35	-	4.023,78	952.513,77	0,42	952.513,77	0,42
36	-	677,74	292.371,06	0,23	292.371,06	0,23
37	-	263,99	173.145,44	0,15	173.145,44	0,15
38	-	2.389,90	1.246.992,57	0,19	1.246.992,57	0,19
39	-	3.728,95	1.162.701,21	0,32	1.049.620,11	0,36
40	-	417,12	206.047,02	0,20	122.140,51	0,34
41	-	612,82	1.219.988,91	0,05	1.219.988,91	0,05
42	-	3.059,93	965.459,25	0,32	965.459,25	0,32
43	-	1.180,58	285.031,99	0,41	285.031,99	0,41
44	-	53,07	39.602,62	0,13	39.602,62	0,13
45	-	1.006,59	266.367,40	0,38	265.678,98	0,38
46	-	1.054,22	326.708,70	0,32	325.708,70	0,32
47	-	138,08	48.417,57	0,29	48.417,57	0,29
48	-	1.398,16	268.189,98	0,52	268.189,98	0,52
49	-	953,03	286.491,48	0,33	286.491,48	0,33
50	-	1.841,60	493.328,10	0,37	493.287,40	0,37
51	-	1.164,81	279.257,24	0,42	279.257,24	0,42
52	-	3.166,63	847.627,82	0,37	847.627,36	0,37
53	-	515,12	159.363,82	0,32	159.363,30	0,32
54	-	3.342,91	751.475,77	0,44	739.154,82	0,45
55	-	1.641,59	234.697,76	0,70	210.979,53	0,78
56	-	1.989,44	369.231,32	0,54	360.630,86	0,55
57	-	102,61	63.838,69	0,16	60.425,30	0,17
58	-	1.192,01	256.483,91	0,46	247.514,15	0,48
59	-	813,65	639.241,02	0,13	323.179,39	0,25
60	-	80,46	100.523,92	0,08	99.245,59	0,08
61	-	5.100,32	1.264.297,67	0,40	1.030.341,18	0,50
62	-	779,58	336.299,77	0,23	203.662,00	0,38
63	-	324,35	212.728,62	0,15	157.635,99	0,21
64	-	2.873,13	1.499.127,34	0,19	985.271,62	0,29
65	-	4.408,92	1.355.015,48	0,33	944.971,64	0,47
66	-	425,15	124.490,71	0,34	124.490,71	0,34
67	-	624,87	1.243.975,56	0,05	99.869,59	0,63
68	-	3.166,63	999.122,75	0,32	999.122,75	0,32
69	-	1.219,92	294.529,51	0,41	281.379,52	0,43
70	-	57,05	42.569,75	0,13	16.387,94	0,35
71	-	1.036,08	273.462,38	0,38	272.311,90	0,38
72	-	1.086,46	335.669,67	0,32	282.270,66	0,38
73	-	145,35	50.969,65	0,29	45.552,12	0,32
74	-	1.411,23	270.696,13	0,52	266.919,17	0,53
75	-	984,44	295.933,45	0,33	279.533,42	0,35
76	-	1.854,41	496.717,10	0,37	473.357,24	0,39
77	-	1.193,94	286.239,84	0,42	271.358,28	0,44
78	-	4.955,71	5.391.862,33	0,09	1.381.666,46	0,36

Tabel Shock Skenario 2 (Injeksi Sektor Produksi Tanaman Lainnya sebesar 5,85 Triliun)

Kode SNSE	Shock (Rp Milyar)	Hasil (Rp Milyar)	Output Awal (Rp Milyar)	Persentase Terhadap Output Awal (%)	Permintaan Akhir (Rp Milyar)	Persentase Terhadap Permintaan Akhir (%)
1	-	1.281,41	131.127,84	0,98	131.127,84	0,98
2	-	267,33	35.006,16	0,76	35.006,16	0,76
3	-	2.894,55	387.957,53	0,75	387.957,53	0,75
4	-	211,90	40.419,47	0,52	40.419,47	0,52
5	-	274,27	220.335,48	0,12	220.335,48	0,12
6	-	529,00	413.958,41	0,13	413.571,65	0,13
7	-	182,13	132.047,46	0,14	132.047,46	0,14
8	-	177,06	120.263,76	0,15	120.263,76	0,15
9	-	201,44	92.286,63	0,22	92.286,63	0,22
10	-	745,69	435.131,74	0,17	434.457,76	0,17
11	-	255,59	150.447,17	0,17	150.447,17	0,17
12	-	379,77	226.526,38	0,17	226.526,38	0,17
13	-	135,41	70.180,93	0,19	70.180,93	0,19
14	-	326,63	192.172,92	0,17	191.526,47	0,17
15	-	28,74	13.012,00	0,22	13.012,00	0,22
16	-	48,52	33.451,07	0,15	33.451,07	0,15
17	-	3.997,65	2.470.974,96	0,16	2.464.317,45	0,16
18	-	673,58	176.756,68	0,38	172.929,91	0,38
19	-	3.049,52	731.562,84	0,42	714.539,55	0,42
20	-	1.036,77	494.234,22	0,21	478.880,67	0,21
21	-	550,24	173.151,85	0,32	167.655,39	0,32
22	-	1.398,86	468.454,50	0,30	466.115,37	0,30
23	-	1.060,88	710.495,47	0,15	695.076,86	0,15
24	-	393,45	243.905,48	0,16	241.567,31	0,16
25	-	1.431,85	827.883,49	0,17	826.173,60	0,17
26	-	3.050,05	1.916.701,71	0,16	1.892.524,80	0,16
27	-	1.446,73	1.264.033,42	0,11	916.802,45	0,11
28	-	1.353,55	468.256,54	0,29	467.369,02	0,29
29	5.850,00	6.597,09	202.251,11	3,26	202.251,11	3,26
30	-	746,79	265.105,49	0,28	265.105,49	0,28
31	-	41,97	52.221,85	0,08	52.221,85	0,08
32	-	441,56	182.474,58	0,24	182.376,85	0,24
33	-	388,28	610.107,14	0,06	610.107,14	0,06
34	-	32,90	82.053,44	0,04	82.053,44	0,04
35	-	2.011,89	952.513,77	0,21	952.513,77	0,21
36	-	338,87	292.371,06	0,12	292.371,06	0,12
37	-	132,00	173.145,44	0,08	173.145,44	0,08
38	-	1.194,95	1.246.992,57	0,10	1.246.992,57	0,10
39	-	1.864,47	1.162.701,21	0,16	1.049.620,11	0,16
40	-	208,56	206.047,02	0,10	122.140,51	0,10
41	-	306,41	1.219.988,91	0,03	1.219.988,91	0,03
42	-	1.529,97	965.459,25	0,16	965.459,25	0,16
43	-	590,29	285.031,99	0,21	285.031,99	0,21
44	-	26,54	39.602,62	0,07	39.602,62	0,07
45	-	503,30	266.367,40	0,19	265.678,98	0,19
46	-	527,11	326.708,70	0,16	325.708,70	0,16
47	-	69,04	48.417,57	0,14	48.417,57	0,14
48	-	699,08	268.189,98	0,26	268.189,98	0,26
49	-	476,51	286.491,48	0,17	286.491,48	0,17
50	-	920,80	493.328,10	0,19	493.287,40	0,19
51	-	582,41	279.257,24	0,21	279.257,24	0,21
52	-	1.583,31	847.627,82	0,19	847.627,36	0,19
53	-	257,56	159.363,82	0,16	159.363,30	0,16
54	-	1.671,45	751.475,77	0,22	739.154,82	0,22
55	-	820,80	234.697,76	0,35	210.979,53	0,35
56	-	994,72	369.231,32	0,27	360.630,86	0,27
57	-	51,31	63.838,69	0,08	60.425,30	0,08
58	-	596,00	256.483,91	0,23	247.514,15	0,23
59	-	406,83	639.241,02	0,06	323.179,39	0,06
60	-	40,23	100.523,92	0,04	99.245,59	0,04
61	-	2.550,16	1.264.297,67	0,20	1.030.341,18	0,20
62	-	389,79	336.299,77	0,12	203.662,00	0,12
63	-	162,17	212.728,62	0,08	157.635,99	0,08
64	-	1.436,56	1.499.127,34	0,10	985.271,62	0,10
65	-	2.204,46	1.355.015,48	0,16	944.971,64	0,16
66	-	212,57	124.490,71	0,17	124.490,71	0,17
67	-	312,44	1.243.975,56	0,03	99.869,59	0,03
68	-	1.583,31	999.122,75	0,16	999.122,75	0,16
69	-	609,96	294.529,51	0,21	281.379,52	0,21

Tabel Shock Skenario 3 (Injeksi Sektor Produksi Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat dan Semen sebesar 11,7 Triliun)

Kode SENSE	Shock (Rp Milyar)	Hasil (Rp Milyar)	Output Awal (Rp Milyar)	Persentase Terhadap Output Awal (%)	Permintaan Akhir (Rp Milyar)	Persentase Terhadap Permintaan Akhir (%)
1	-	480,74	131.127,84	0,37	131.127,84	0,37
2	-	120,31	35.006,16	0,34	35.006,16	0,34
3	-	1.468,97	387.957,53	0,38	387.957,53	0,38
4	-	146,41	40.419,47	0,36	40.419,47	0,36
5	-	592,29	220.335,48	0,27	220.335,48	0,27
6	-	1.356,39	413.958,41	0,33	413.571,65	0,33
7	-	462,03	132.047,46	0,35	132.047,46	0,35
8	-	306,47	120.263,76	0,25	120.263,76	0,25
9	-	255,87	92.286,63	0,28	92.286,63	0,28
10	-	1.270,55	435.131,74	0,29	434.457,76	0,29
11	-	341,98	150.447,17	0,23	150.447,17	0,23
12	-	499,46	226.526,38	0,22	226.526,38	0,22
13	-	200,56	70.180,93	0,29	70.180,93	0,29
14	-	598,15	192.172,92	0,31	191.526,47	0,31
15	-	40,03	13.012,00	0,31	13.012,00	0,31
16	-	97,04	33.451,07	0,29	33.451,07	0,29
17	-	9.480,80	2.470.974,96	0,38	2.464.317,45	0,38
18	-	542,56	176.756,68	0,31	172.929,91	0,31
19	-	2.468,05	731.562,84	0,34	714.539,55	0,34
20	-	1.422,24	494.234,22	0,29	478.880,67	0,29
21	-	563,17	173.151,85	0,33	167.655,39	0,33
22	-	1.564,12	468.454,50	0,33	466.115,37	0,33
23	-	2.195,96	710.495,47	0,31	695.076,86	0,31
24	-	762,12	243.905,48	0,31	241.567,31	0,31
25	-	2.513,49	827.883,49	0,30	826.173,60	0,30
26	-	7.091,32	1.916.701,71	0,37	1.892.524,80	0,37
27	-	3.120,90	1.264.033,42	0,25	916.802,45	0,25
28	-	1.780,81	468.256,54	0,38	467.369,02	0,38
29	-	940,80	202.251,11	0,47	202.251,11	0,47
30	-	819,14	265.105,49	0,31	265.105,49	0,31
31	-	52,01	52.221,85	0,10	52.221,85	0,10
32	-	546,41	182.474,58	0,30	182.376,85	0,30
33	-	2.459,41	610.107,14	0,40	610.107,14	0,40
34	-	92,19	82.053,44	0,11	82.053,44	0,11
35	-	2.471,94	952.513,77	0,26	952.513,77	0,26
36	-	431,64	292.371,06	0,15	292.371,06	0,15
37	-	159,88	173.145,44	0,09	173.145,44	0,09
38	-	1.643,40	1.246.992,57	0,13	1.246.992,57	0,13
39	11.700,00	14.296,46	1.162.701,21	1,23	1.049.620,11	1,23
40	-	348,12	206.047,02	0,17	122.140,51	0,17
41	-	241,60	1.219.988,91	0,02	1.219.988,91	0,02
42	-	1.970,65	965.459,25	0,20	965.459,25	0,20
43	-	816,66	285.031,99	0,29	285.031,99	0,29
44	-	41,20	39.602,62	0,10	39.602,62	0,10
45	-	646,97	266.367,40	0,24	265.678,98	0,24
46	-	740,51	326.708,70	0,23	325.708,70	0,23
47	-	101,11	48.417,57	0,21	48.417,57	0,21
48	-	722,03	268.189,98	0,27	268.189,98	0,27
49	-	649,75	286.491,48	0,23	286.491,48	0,23
50	-	1.365,73	493.328,10	0,28	493.287,40	0,28
51	-	727,73	279.257,24	0,26	279.257,24	0,26
52	-	2.039,36	847.627,82	0,24	847.627,36	0,24
53	-	345,47	159.363,82	0,22	159.363,30	0,22
54	-	2.199,07	751.475,77	0,29	739.154,82	0,29
55	-	1.033,61	234.697,76	0,44	210.979,53	0,44
56	-	1.091,08	369.231,32	0,30	360.630,86	0,30
57	-	63,58	63.838,69	0,10	60.425,30	0,10
58	-	737,51	256.483,91	0,29	247.514,15	0,29
59	-	2.576,85	639.241,02	0,40	323.179,39	0,40
60	-	112,74	100.523,92	0,11	99.245,59	0,11
61	-	3.133,29	1.264.297,67	0,25	1.030.341,18	0,25
62	-	496,49	336.299,77	0,15	203.662,00	0,15
63	-	196,43	212.728,62	0,09	157.635,99	0,09
64	-	1.975,69	1.499.127,34	0,13	985.271,62	0,13
65	-	3.069,93	1.355.015,48	0,23	944.971,64	0,23
66	-	354,81	124.490,71	0,29	124.490,71	0,29
67	-	246,35	1.243.975,56	0,02	99.869,59	0,02
68	-	2.039,36	999.122,75	0,20	999.122,75	0,20
69	-	843,87	294.529,51	0,29	281.379,52	0,29
70	-	44,29	42.569,75	0,10	16.387,94	0,10
71	-	665,92	273.462,38	0,24	272.311,90	0,24
72	-	763,16	335.669,67	0,23	282.270,66	0,23
73	-	106,44	50.969,65	0,21	45.552,12	0,21

Tabel Shock Skenario 4 (Injeksi Sektor Produksi Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat dan Semen sebesar 5,85 Triliun)

Kode SENSE	Shock (Rp Milyar)	Hasil (Rp Milyar)	Output Awal (Rp Milyar)	Persentase Terhadap Output Awal (%)	Permintaan Akhir (Rp Milyar)	Persentase Terhadap Permintaan Akhir (%)
1	-	240,37	131.127,84	0,18	131.127,84	0,18
2	-	60,16	35.006,16	0,17	35.006,16	0,17
3	-	734,48	387.957,53	0,19	387.957,53	0,19
4	-	73,21	40.419,47	0,18	40.419,47	0,18
5	-	296,14	220.335,48	0,13	220.335,48	0,13
6	-	678,19	413.958,41	0,16	413.571,65	0,16
7	-	231,01	132.047,46	0,17	132.047,46	0,17
8	-	153,24	120.263,76	0,13	120.263,76	0,13
9	-	127,94	92.286,63	0,14	92.286,63	0,14
10	-	635,28	435.131,74	0,15	434.457,76	0,15
11	-	170,99	150.447,17	0,11	150.447,17	0,11
12	-	249,73	226.526,38	0,11	226.526,38	0,11
13	-	100,28	70.180,93	0,14	70.180,93	0,14
14	-	299,08	192.172,92	0,16	191.526,47	0,16
15	-	20,01	13.012,00	0,15	13.012,00	0,15
16	-	48,52	33.451,07	0,15	33.451,07	0,15
17	-	4.740,40	2.470.974,96	0,19	2.464.317,45	0,19
18	-	271,28	176.756,68	0,15	172.929,91	0,15
19	-	1.234,03	731.562,84	0,17	714.539,55	0,17
20	-	711,12	494.234,22	0,14	478.880,67	0,14
21	-	281,58	173.151,85	0,16	167.655,39	0,16
22	-	782,06	468.454,50	0,17	466.115,37	0,17
23	-	1.097,98	710.495,47	0,15	695.076,86	0,15
24	-	381,06	243.905,48	0,16	241.567,31	0,16
25	-	1.256,74	827.883,49	0,15	826.173,60	0,15
26	-	3.545,66	1.916.701,71	0,18	1.892.524,80	0,18
27	-	1.560,45	1.264.033,42	0,12	916.802,45	0,12
28	-	890,40	468.256,54	0,19	467.369,02	0,19
29	-	470,40	202.251,11	0,23	202.251,11	0,23
30	-	409,57	265.105,49	0,15	265.105,49	0,15
31	-	26,01	52.221,85	0,05	52.221,85	0,05
32	-	273,20	182.474,58	0,15	182.376,85	0,15
33	-	1.229,70	610.107,14	0,20	610.107,14	0,20
34	-	46,09	82.053,44	0,06	82.053,44	0,06
35	-	1.235,97	952.513,77	0,13	952.513,77	0,13
36	-	215,82	292.371,06	0,07	292.371,06	0,07
37	-	79,94	173.145,44	0,05	173.145,44	0,05
38	-	821,70	1.246.992,57	0,07	1.246.992,57	0,07
39	5.850,00	7.148,23	1.162.701,21	0,61	1.049.620,11	0,61
40	-	174,06	206.047,02	0,08	122.140,51	0,08
41	-	120,80	1.219.988,91	0,01	1.219.988,91	0,01
42	-	985,33	965.459,25	0,10	965.459,25	0,10
43	-	408,33	285.031,99	0,14	285.031,99	0,14
44	-	20,60	39.602,62	0,05	39.602,62	0,05
45	-	323,48	266.367,40	0,12	265.678,98	0,12
46	-	370,26	326.708,70	0,11	325.708,70	0,11
47	-	50,56	48.417,57	0,10	48.417,57	0,10
48	-	361,01	268.189,98	0,13	268.189,98	0,13
49	-	324,88	286.491,48	0,11	286.491,48	0,11
50	-	682,87	493.328,10	0,14	493.287,40	0,14
51	-	363,86	279.257,24	0,13	279.257,24	0,13
52	-	1.019,68	847.627,82	0,12	847.627,36	0,12
53	-	172,73	159.363,30	0,11	159.363,30	0,11
54	-	1.099,54	751.475,77	0,15	739.154,82	0,15
55	-	516,81	234.697,76	0,22	210.979,53	0,22
56	-	545,54	369.231,32	0,15	360.630,86	0,15
57	-	31,79	63.838,69	0,05	60.425,30	0,05
58	-	368,76	256.483,91	0,14	247.514,15	0,14
59	-	1.288,42	639.241,02	0,20	323.179,39	0,20
60	-	56,37	100.523,92	0,06	99.245,59	0,06
61	-	1.566,65	1.264.297,67	0,12	1.030.341,18	0,12
62	-	248,24	336.299,77	0,07	203.662,00	0,07
63	-	98,21	212.728,62	0,05	157.635,99	0,05
64	-	987,85	1.499.127,34	0,07	985.271,62	0,07
65	-	1.534,96	1.355.015,48	0,11	944.971,64	0,11
66	-	177,41	124.490,71	0,14	124.490,71	0,14
67	-	123,17	1.243.975,56	0,01	99.869,59	0,01
68	-	1.019,68	999.122,75	0,10	999.122,75	0,10
69	-	421,93	294.529,51	0,14	281.379,52	0,14
70	-	22,14	42.569,75	0,05	16.387,94	0,05
71	-	332,96	273.462,38	0,12	272.311,90	0,12

Tabel Shock Skenario 5 (Injeksi Sektor Produksi Tanaman Lainnya dan Sektor Produksi Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat dan Semen sebesar masing masing 5,85 Triliun)

Kode SENSE	Shock (Rp Milyar)	Hasil (Rp Milyar)	Output Awal (Rp Milyar)	Persentase Terhadap Output Awal (%)	Permintaan Akhir (Rp Milyar)	Persentase Terhadap Permintaan Akhir (%)
1	-	1.521,79	131.127,84	1,16	131.127,84	1,16
2	-	327,49	35.006,16	0,94	35.006,16	0,94
3	-	3.629,04	387.957,53	0,94	387.957,53	0,94
4	-	285,11	40.419,47	0,71	40.419,47	0,71
5	-	570,42	220.335,48	0,26	220.335,48	0,26
6	-	1.207,20	413.958,41	0,29	413.571,65	0,29
7	-	413,14	132.047,46	0,31	132.047,46	0,31
8	-	330,30	120.263,76	0,27	120.263,76	0,27
9	-	329,38	92.286,63	0,36	92.286,63	0,36
10	-	1.380,97	435.131,74	0,32	434.457,76	0,32
11	-	426,59	150.447,17	0,28	150.447,17	0,28
12	-	629,50	226.526,38	0,28	226.526,38	0,28
13	-	235,69	70.180,93	0,34	70.180,93	0,34
14	-	625,71	192.172,92	0,33	191.526,47	0,33
15	-	48,76	13.012,00	0,37	13.012,00	0,37
16	-	97,04	33.451,07	0,29	33.451,07	0,29
17	-	8.738,05	2.470.974,96	0,35	2.464.317,45	0,35
18	-	944,86	176.756,68	0,53	172.929,91	0,53
19	-	4.283,55	731.562,84	0,59	714.539,55	0,59
20	-	1.747,89	494.234,22	0,35	478.880,67	0,35
21	-	831,82	173.151,85	0,48	167.655,39	0,48
22	-	2.180,92	468.454,50	0,47	466.115,37	0,47
23	-	2.158,85	710.495,47	0,30	695.076,86	0,30
24	-	774,51	243.905,48	0,32	241.567,31	0,32
25	-	2.688,59	827.883,49	0,32	826.173,60	0,32
26	-	6.595,71	1.916.701,71	0,34	1.892.524,80	0,34
27	-	3.007,18	1.264.033,42	0,24	916.802,45	0,24
28	-	2.243,95	468.256,54	0,48	467.369,02	0,48
29	5.850,00	7.067,49	202.251,11	3,49	202.251,11	3,49
30	-	1.156,36	265.105,49	0,44	265.105,49	0,44
31	-	67,98	52.221,85	0,13	52.221,85	0,13
32	-	714,77	182.474,58	0,39	182.376,85	0,39
33	-	1.617,99	610.107,14	0,27	610.107,14	0,27
34	-	78,99	82.053,44	0,10	82.053,44	0,10
35	-	3.247,86	952.513,77	0,34	952.513,77	0,34
36	-	554,69	292.371,06	0,19	292.371,06	0,19
37	-	211,94	173.145,44	0,12	173.145,44	0,12
38	-	2.016,65	1.246.992,57	0,16	1.246.992,57	0,16
39	5.850,00	9.012,71	1.162.701,21	0,78	1.049.620,11	0,78
40	-	382,62	206.047,02	0,19	122.140,51	0,19
41	-	427,21	1.219.988,91	0,04	1.219.988,91	0,04
42	-	2.515,29	965.459,25	0,26	965.459,25	0,26
43	-	998,62	285.031,99	0,35	285.031,99	0,35
44	-	47,14	39.602,62	0,12	39.602,62	0,12
45	-	826,78	266.367,40	0,31	265.678,98	0,31
46	-	897,36	326.708,70	0,27	325.708,70	0,27
47	-	119,59	48.417,57	0,25	48.417,57	0,25
48	-	1.060,09	268.189,98	0,40	268.189,98	0,40
49	-	801,39	286.491,48	0,28	286.491,48	0,28
50	-	1.603,67	493.328,10	0,33	493.287,40	0,33
51	-	946,27	279.257,24	0,34	279.257,24	0,34
52	-	2.602,99	847.627,82	0,31	847.627,36	0,31
53	-	430,29	159.363,82	0,27	159.363,30	0,27
54	-	2.770,99	751.475,77	0,37	739.154,82	0,37
55	-	1.337,60	234.697,76	0,57	210.979,53	0,57
56	-	1.540,26	369.231,32	0,42	360.630,86	0,42
57	-	83,10	63.838,69	0,13	60.425,30	0,13
58	-	964,76	256.483,91	0,38	247.514,15	0,38
59	-	1.695,25	639.241,02	0,27	323.179,39	0,27
60	-	96,60	100.523,92	0,10	99.245,59	0,10
61	-	4.116,81	1.264.297,67	0,33	1.030.341,18	0,33
62	-	638,03	336.299,77	0,19	203.662,00	0,19
63	-	260,39	212.728,62	0,12	157.635,99	0,12
64	-	2.424,41	1.499.127,34	0,16	985.271,62	0,16
65	-	3.739,42	1.355.015,48	0,28	944.971,64	0,28
66	-	389,98	124.490,71	0,31	124.490,71	0,31
67	-	435,61	1.243.975,56	0,04	99.869,59	0,04
68	-	2.602,99	999.122,75	0,26	999.122,75	0,26
69	-	1.031,89	294.529,51	0,35	281.379,52	0,35
70	-	50,67	42.569,75	0,12	16.387,94	0,12
71	-	851,00	273.462,38	0,31	272.311,90	0,31
72	-	924,81	335.669,67	0,28	282.270,66	0,28
73	-	125,90	50.969,65	0,25	45.552,12	0,25

Tabel Agregasi SNSE Penelitian

Kode SNSE 2008	Kode Agregasi Penelitian			Keterangan		
1	2	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Pertanian	Penerima Upah	Desa
2	2	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Pertanian	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Kota
3	3	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Pertanian	Penerima Upah	Desa
4	4	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Pertanian	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Kota
5	5	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Produksi, Operator Alat Angkutan, Manua dan Buruh Kasar	Penerima Upah	Desa
6	6	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Produksi, Operator Alat Angkutan, Manua dan Buruh Kasar	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Kota
7	7	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Produksi, Operator Alat Angkutan, Manua dan Buruh Kasar	Penerima Upah	Desa
8	8	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Produksi, Operator Alat Angkutan, Manua dan Buruh Kasar	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Kota
9	9	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Tata Usaha Pengjualan dan Jasa-Jasa	Penerima Upah	Desa
10	10	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Tata Usaha Pengjualan dan Jasa-Jasa	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Kota
11	11	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Tata Usaha Pengjualan dan Jasa-Jasa	Penerima Upah	Desa
12	12	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Tata Usaha Pengjualan dan Jasa-Jasa	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Kota
13	13	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Professional dan Teknis	Penerima Upah	Desa
14	14	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Professional dan Teknis	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Kota
15	15	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Professional dan Teknis	Penerima Upah	Desa
16	16	Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Professional dan Teknis	Bukan Penerima Upah dan Gaji	Kota
17	17	Faktor Produksi	Bukan Tenaga Kerja			
18	18	Institusi	Rumah Tangga	Pertanian	Buruh	
19	19	Institusi	Rumah Tangga	Pertanian	Pengusaha Pertanian	
20	20	Institusi	Rumah Tangga	Bukan Pertanian	Pedesaan	Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh
21	21	Institusi	Rumah Tangga	Bukan Pertanian	Pedesaan	Bukan angkutan kerja dan golongan tidak jelas
22	22	Institusi	Rumah Tangga	Bukan Pertanian	Pedesaan	Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknis, guru, pekerja TU
23	23	Institusi	Rumah Tangga	Bukan Pertanian	Perkotaan	Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh
24	24	Institusi	Rumah Tangga	Bukan Pertanian	Perkotaan	Bukan angkutan kerja dan golongan tidak jelas
25	25	Institusi	Rumah Tangga	Bukan Pertanian	Perkotaan	Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknis, guru, pekerja TU
26	26	Institusi	Perusahaan			
27	27	Institusi	Pemerintah			
28	28	Sektor Produksi	Pertanian Tanaman Pangan			
30	30	Sektor Produksi	Peternakan dan Hasil Hasilnya			
32	32	Sektor Produksi	Perikanan			
35	35	Sektor Produksi	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau			
29	29	Sektor Produksi	Pertanian Tanaman Lainnya			
31	31	Sektor Produksi	Kehutanan dan Perburuan			
33	33	Sektor Produksi	Pertambangan Batubara, Bijih Logam dan Minyak Bumi			
34	34	Sektor Produksi	Pertambangan dan Penggalian Lainnya			
36	36	Sektor Produksi	Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit			
37	37	Sektor Produksi	Industri Kayu & Barang Dari Kayu			
38	38	Sektor Produksi	Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dan Barang Dari Logam dan Industri Lainnya			
39	39	Sektor Produksi	Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat, Semen			
40	40	Sektor Produksi	Elektrik, Gas Dan Air Minum			
41	41	Sektor Produksi	Konstruksi			
42	42	Sektor Produksi	Perdagangan			
43	43	Sektor Produksi	Restoran			
44	44	Sektor Produksi	Perhotelan			
45	45	Sektor Produksi	Angkutan Darat			
46	46	Sektor Produksi	Angkutan Udara, Air dan Komunikasi			
47	47	Sektor Produksi	Jasa Penunjang Angkutan, dan Perdagangan			
51	51	Sektor Produksi	Jasa Perseorangan, Rumah tangga dan Jasa Lainnya			
48	48	Sektor Produksi	Bank dan Asuransi			
49	49	Sektor Produksi	Real Estate dan Jasa Perusahaan			
50	50	Sektor Produksi	Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya			
52	52	Marginal Pedagangan				
53	53	Marginal Pengangkutan				
54	54	Komoditas Domestik	Pertanian Tanaman Pangan			
56	56	Komoditas Domestik	Peternakan dan Hasil Hasilnya			
58	58	Komoditas Domestik	Perikanan			
61	61	Komoditas Domestik	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau			
55	55	Komoditas Domestik	Pertanian Tanaman Lainnya			
57	57	Komoditas Domestik	Kehutanan dan Perburuan			
59	59	Komoditas Domestik	Pertambangan Batubara, Bijih Logam dan Minyak Bumi			
60	60	Komoditas Domestik	Pertambangan dan Penggalian Lainnya			
62	62	Komoditas Domestik	Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit			
63	63	Komoditas Domestik	Industri Kayu & Barang Dari Kayu			
64	64	Komoditas Domestik	Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dan Barang Dari Logam dan Industri Lainnya			
65	65	Komoditas Domestik	Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat, Semen			
66	66	Komoditas Domestik	Elektrik, Gas Dan Air Minum			
67	67	Komoditas Domestik	Konstruksi			
68	68	Komoditas Domestik	Perdagangan			
69	69	Komoditas Domestik	Restoran			
70	70	Komoditas Domestik	Perhotelan			
71	71	Komoditas Domestik	Angkutan Darat			
72	72	Komoditas Domestik	Angkutan Udara, Air dan Komunikasi			
73	73	Komoditas Domestik	Jasa Penunjang Angkutan, dan Perdagangan			
77	77	Komoditas Domestik	Jasa Perseorangan, Rumah tangga dan Jasa Lainnya			
74	74	Komoditas Domestik	Bank dan Asuransi			
75	75	Komoditas Domestik	Real Estate dan Jasa Perusahaan			
76	76	Komoditas Domestik	Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya			
78	78 - 100	Komoditas Import	Pertanian Tanaman Pangan Peternakan dan Hasil Hasilnya Perikanan Industri Makanan, Minuman dan Tembakau Pertanian Tanaman Lainnya Kehutanan dan Perburuan Pertambangan Batubara, Bijih Logam dan Minyak Bumi Pertambangan dan Penggalian Lainnya Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit Industri Kayu & Barang Dari Kayu Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dan Barang Dari Logam dan Industri Lainnya Industri Kimia, Hasil dari Tanah Liat, Semen Elektrik, Gas Dan Air Minum Konstruksi Perdagangan Restoran Perhotelan Angkutan Darat Angkutan Udara, Air dan Komunikasi Jasa Penunjang Angkutan, dan Perdagangan Jasa Perseorangan, Rumah tangga dan Jasa Lainnya Bank dan Asuransi Real Estate dan Jasa Perusahaan Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya			

Madani

Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.